

**OPTIMALISASI PENATAUSAHAAN ASET TETAP TANAH PADA PEMERINTAH KOTA
MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

JULIVAN TAUFIQ OKYNAWA

NPP. 30.1078

Asdaf Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Program Studi Keuangan Publik

Email: julivanokynawa7@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Eljawati,S.Sos,MM

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The background for writing this thesis is that economic potential means that there are financial and economic benefits that can be obtained in the future that can support the role and function of local government as a provider of public services to the community. The Mataram City Government, with various hard work efforts was made to maintain the WTP title in accordance with applicable regulations. Referring to the Audit Results Report on the Mataram City Regional Government Financial Report for 2021, the BPK still found records of problems. One of them is the problem in asset management where many are still not certified. Problems in the management of land assets such as the fact that there is still a lot of land that does not have a certificate, there is overlap in the ownership of certificates between the Mataram City government and the NTB Provincial government, as well as a lack of physical security in the form of installing ownership signs and there is still a lot of land that has not been fenced off. **Purpose:** This study aims to determine the efforts that have been made by the Regional Finance Agency in Optimizing the Administration of Land Fixed Assets in the Regional Financial Reports of the City of Mataram, West Nusa Tenggara Province. **Method:** This research is a qualitative research in this study which is the most important factor and element, namely in the form of the nature of the data obtained, namely scientific data presented in the form of descriptions and explanations which will become empirical information for the research. **Results:** The Mataram City Regional Finance Agency (BKD) was asked to be optimal in managing PBB-P2. In addition, the BKD was also asked to coordinate with the Mataram City National Land Agency (BPN) to obtain basic data on certificates/proof of land ownership for 3,248 land parcels that do not yet have a Tax Object Notification Letter (SPOP). The role of the Mataram City Government and the West Lombok Regency Government has not been fully resolved, especially with regard to land assets owned by the Mataram City Government and the West Lombok Regency Government. Due to the vulnerability of claims made by the community because of the community's ignorance of local government land assets. one of the activities of asset administration is inventory at the Mataram City BKD which will influence the implementation of inventory activities so as to optimize the fixed asset administration of regional financial reports in order to maintain the unqualified opinion title at the Mataram City BPKAD. **Conclusion:** The mechanism for administering land assets carried out by the Mataram City Regional Financial Board as a whole is in accordance with what is regulated. Obstacles found in optimizing the administration of land fixed assets on financial reports. Administrative security of land assets in the past was not good and where there were several land assets in the city of Mataram, grants from West Lombok district, where land certificates were not granted. The Efforts that can be applied to Optimizing the Administration of Land Fixed Assets on Financial

Statements. There are innovations to Web-based applications that are developed with the benefits of existing technological advances.

Key Words : Optimization, Administration, Assets, Financial Reports.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Latar belakang penulisan skripsi ini adalah potensi ekonomi berarti adanya manfaat finansial serta ekonomi yang dapat diperoleh di masa mendatang yang dapat mendukung peran serta fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik terhadap masyarakat. Pemerintah Kota Mataram, dengan berbagai upaya kerja keras dilakukan untuk mempertahankan gelar WTP sesuai peraturan yang berlaku. Merujuk Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2021 BPK masih menemukan adanya catatan permasalahan. Salah satunya adalah permasalahan dalam pengelolaan aset yang masih banyak belum bersertifikat. Permasalahan dalam pengelolaan aset tanah seperti masih banyak tanah yang belum mempunyai sertifikat, adanya tumpang tindih dalam kepemilikan sertifikat antara pemerintah Kota Mataram terhadap pemerintah Provinsi NTB, serta kurangnya pengamanan fisik berupa pemasangan tanda kepemilikan dan masih banyaknya tanah yang belum di pagar. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah dalam Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Tanah Terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. **Metode:** Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif dalam penelitian ini yang menjadi faktor serta unsur terpenting yaitu berupa sifat data yang didapat yaitu data ilmiah yang disajikan pada bentuk uraian serta penjelasan yang akan jadi informasi empirik kepada penelitian tersebut. **Hasil/Temuan:** Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram diminta optimal dalam mengelola PBB-P2. Selain itu, BKD juga diminta berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram untuk mendapatkan data dasar sertifikat/bukti kepemilikan tanah atas 3.248 bidang tanah yang belum memiliki Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Peran Pemerintah Kota Mataram dan Pemerintah kabupaten Lombok barat masih belum diselesaikan secara penuh khususnya terkait aset tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Mataram dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Dikarenakan rawannya akan pengklaiman yang dilakukan oleh masyarakat karena ketidaktahuan masyarakat akan aset tanah pemda. salah satu kegiatan dari penatausahaan aset yaitu inventarisasi pada BKD Kota Mataram yang akan berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi sehingga pengoptimalan penatausahaan aset tetap atas laporan keuangan daerah dalam rangka mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian di BPKAD Kota Mataram. **Kesimpulan:** Mekanisme penatausahaan aset tanah yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Mataram secara keseluruhan sesuai apa yang diatur. Hambatan yang ditemukan pada optimalisasi penatausahaan aset tetap tanah atas laporan keuangan. Pengamanan administrasi aset tanah pada zaman dahulu yang kurang baik dan dimana ada beberapa aset tanah kota mataram hibah dari kabupaten Lombok barat yang dimana dihibahkan tidak dapat sertifikat tanah. Adapun Upaya yang dapat diterapkan pada Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Tanah Atas Laporan Keuangan. Adanya inovasi terhadap aplikasi berbasis Web yang dikembangkan dengan manfaat kemajuan teknologi yang ada.

Kata Kunci: Optimalisasi, Administrasi, Aset, Laporan Keuangan

1.1. PENDAHULUAN

1.2. Latar Belakang

Guna merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka dibarengi suatu perubahan paradigma baru pengelolaan aset daerah yang ditandai dengan dibuatnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004

mengenai Perbendaharaan Negara dan Pengelolaan Aset Daerah yang professional serta modern dengan mengedepankan Good Governance di satu sisi harapannya akan bisa meningkatkan kepercayaan pengelola keuangan daerah dari masyarakat.

Secara umum, aset yang berasal dari Bahasa Inggris asset, yakni barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang memiliki nilai ekonomi (economic value), nilai komersial atau nilai jual (commercial value), atau nilai tukar (exchange value) yang dipunyai oleh badan usaha, instansi atau perorangan (individu). Pada dasarnya aset merupakan istilah ekonomi, dengan demikian, aset adalah sesuatu yang dimiliki nilai ekonomis.

Potensi ekonomi berarti adanya manfaat finansial serta ekonomi yang dapat diperoleh di masa mendatang yang dapat mendukung peran serta fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik terhadap masyarakat.

Hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Mataram di tahun 2021 masih menyisakan masalah aset tetap tanah, yaitu terkait tanah yang belum bersertifikat terdapat bidang tanah senilai Rp.399.562.823.317,00 yang belum bersertifikat Sehingga Nilai Tanah Pada akhir Tahun 2021 menjadi sebesar Rp1.063.456.670.301,00.

Tabel 1.1
Catatan atas Laporan Keuangan Mataram Tahun 2021

No	Saldo Tanah		Porsentase	Nilai
	Tahun 2020	Tahun 2021		
1	Rp1.050.034.844.291,00	Rp1.063.456.670.301,00	1,28%	Rp13.421.826.010,00

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Mataram

Berdasarkan tabel 1.1 Saldo Tanah 31 Desember naik sebesar 1,28% hasil penemuan Badan Pemeriksa Keuangan. Temuan dari BPK tersebut mengenai laporan keuangan daerah penilaian yang tidak dapat sertifikasi nilai aset tetap yang tidak didukung informasi yang lengkap sehingga diragukan keberadaannya, serta temuan-temuan tambahan terkait kelengkapan informasi lainnya merupakan masalah yang menyangkut perlakuan akuntansi aset tetap.

Kewajiban Pemerintah Daerah untuk mensertifikatkan tanah telah tercantum didalam rumusan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dalam pasal 49 ayat (1) yang menentukan jika Barang Milik Negara atau Daerah yang berupa tanah dikuasai oleh Pemerintah Pusat atau Daerah harus disertifikatkan dengan atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini menjadi tugas pemerintah untuk mensertifikatkan 1/3 dari tanah yang belum memiliki sertifikat yang terdapat di Kota Mataram. Berdasarkan uraian permasalahan penatausahaan aset tetap tanah sehingga muncul pertanyaan sejauh mana laporan keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan di Kota Mataram. Berhubung dengan permasalahan tersebut peneliti tertarik guna mengadakan penelitian tentang **“OPTIMALISASI PENATAUSAHAAN ASET TETAP TANAH PADA PEMERINTAH KOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT”**.

1.3. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan jika Barang Milik Negara atau Daerah yang berupa tanah dikuasai oleh Pemerintah Pusat atau Daerah harus disertifikatkan dengan atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini menjadi tugas pemerintah untuk mensertifikatkan 1/3 dari tanah yang belum memiliki sertifikat yang terdapat di Kota Mataram.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu,. Penelitian Fitri Wulan 2019 (Fitri, 2019), menemukan bahwa Pengelolaan Aset Daerah Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan secara baik, ditinjau dari pengamanan serta pemeliharaan serta penatausahaan hambatan pada pengelolaan aset daerah atas tanah milik pemerintah daerah. Penelitian Shandra (2015) menemukan bahwa Hasil dari penelitian sebelumnya, pengamanan dalam pemasangan plang tanda kepemilikan dan pematokan, pengamanan dalam bentuk administrasi yaitu melakukan kelengkapan dokumen kepemilikan dan sertifikasi dan yang terakhir pengamanan dalam bentuk hukum. Penelitian Ayu Atalia (2019) menemukan bahwa Penelitian ini adalah program pelaksanaan sertifikasi tanah aset pemerintah daerah belum berjalan dengan efektif dan masih adanya kendala atau permasalahan sehingga perlu untuk dilakukan upaya dalam mengatasi kendala atau permasalahan tersebut.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Persamaan dalam penelitian ini salah satunya terletak pada objek penelitiannya yaitu aset tanah. Persamaan lainnya yaitu pada metode yang digunakan berupa kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan, perbedaan dalam penelitian ini terletak pada pengelolaan aset dan dalam teknik pengumpulan data penelitian sebelumnya memakai teknik wawancara dan dokumentasi, sedangkan penulis memakai teknik wawancara, observasi serta dokumentasi.

1.6. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Tanah Terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.

I. METODE

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dalam penelitian ini yang menjadi faktor serta unsur terpenting yaitu berupa sifat data yang didapat yaitu data ilmiah yang disajikan pada bentuk uraian serta penjelasan yang bakal jadi informasi empirik kepada penelitian tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan langkah analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu mengumpulkan data yang kemudian data yang diperoleh direduksi dan akan dirangkum. Data yang diperlukan oleh peneliti yaitu berkaitan dengan optimalisasi penatausahaan aset tetap tanah. Data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat. Kesimpulan dari penyajian tersebut dapat diperoleh setelah melakukan penelitian langsung dilapangan. Penelitian ini berfokus pada optimalisasi penatausahaan aset tetap tanah di Pemerintah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga peneliti akan mengkaji lebih lanjut tentang penatausahaan aset tetap tanah berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada penatausahaan aset tetap tanah pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, pelaksanaan penatausahaan terhadap aset tetap tanah milik pemerintah kota mataram dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2014 tentang pedoman Barang Milik Daerah.

3.1. Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Tanah Pada Pemerintahan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat

Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara

umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks. Tujuan akhir dari semua keputusan seperti itu adalah meminimalkan upaya yang diperlukan atau untuk memaksimalkan manfaat yang diinginkan.

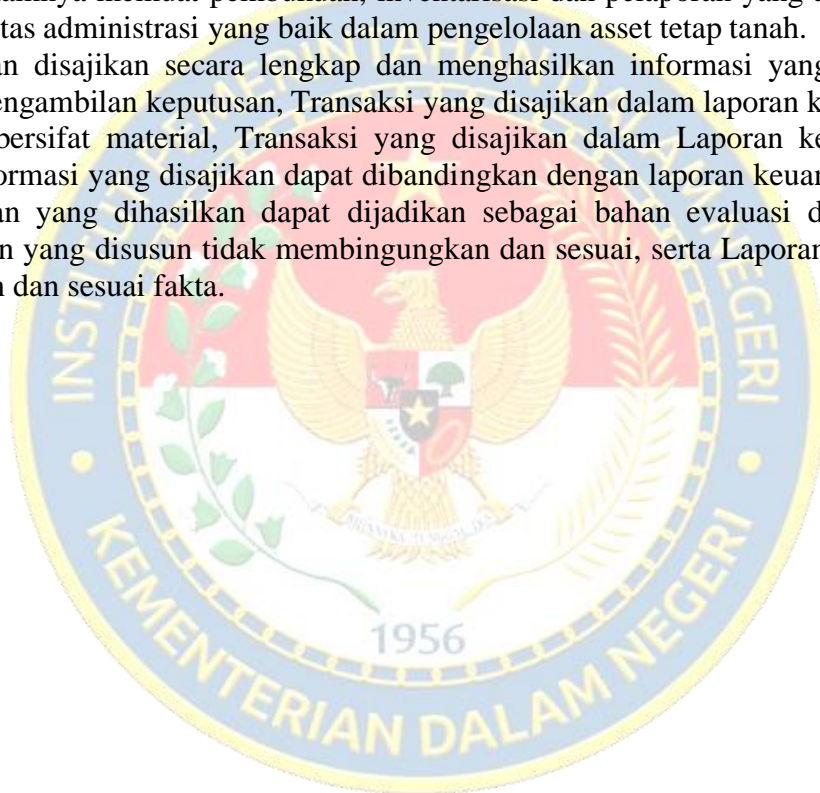
Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah adalah:

Hasil Wawancara Ibu Sekertaris Badan Keuangan Daerah Wa'Qiah,SE, M.Ak

“keseluruhan bercampur kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan aset daerah, pelaporan keuangan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”.

Demikian dapat diartikan bahwa penatausahaan keuangan daerah adalah kegiatan mengatur bertambah dan berkurangnya kekayaan daerah dan pengalokasiannya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan dengan tujuan pemerintahan itu sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi oleh karenanya output dari perencanaan adalah penganggaran. Penatausahaan aset tetap merupakan salah satu tahapan yang penting dalam pengelolaan aset tetap daerah dan di dalamnya memuat pembukuan, inventarisasi dan pelaporan yang akan menghasilkan suatu ketertiban atas administrasi yang baik dalam pengelolaan aset tetap tanah.

Laporan keuangan disajikan secara lengkap dan menghasilkan informasi yang dibutuhkan yang berguna dalam pengambilan keputusan, Transaksi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dari kesalahan yang bersifat material, Transaksi yang disajikan dalam Laporan keuangan tergambar dengan jujur, Informasi yang disajikan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode silam, Laporan keuangan yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dimasa selanjutnya, Laporan keuangan yang disusun tidak membingungkan dan sesuai, serta Laporan keuangan disusun dengan kenyataan dan sesuai fakta.



1. Pembukuan

Tabel 1.2

Indikator Inventarisasi dalam Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Atas LKPD

NO	Pernyataan	Keterangan
1	2	3
1	Pengguna/kuasa pengguna barang telah membuat KIB, KIR, dan Buku inventaris (BI)	Sangat Baik
2	Melakukan Pendaftaran dan pencatatan aset tetap ke dalam daftar pengguna barang	Sangat baik
3	Melakukan penghimpunan barang pengguna dan melakukan penyusunan daftar barang milik daerah berdasarkan himpunan tersebut	Sangat baik
4	Melakukan pendaftaran dan pencatatan sesuai dengan pengelompokan dan kodefikasi	Sangat Baik
5	Kegiatan pembukuan dilakukan secara benar dan teratur setiap bulan dan tahunnya	Sangat Baik
6	Kegiatan pembukuan dikerjakan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Sangat Baik

Sumber : Hasil Pengolahan Data Oleh Penulis, 2022

Berdasarkan pada tabel 1.2 diatas dapat disimpulkan bahwa pada kegiatan pembukuan dalam rangka pengoptimalan penatausahaan aset tetap atas LKPD terlihat bahwa pada kegiatan pembukuan telah dilaksanakan dengan sangat baik seperti halnya pada Pengguna/kuasa pengguna barang yang telah membuat KIB, KIR, dan Buku Inventaris (BI), dan lancarnya kegiatan pendaftaran dan pencatatan aset tetap ke dalam daftar pengguna barang, selanjutnya bagian pendaftaran dan pencatatan yang telah disesuaikan dengan pengelompokkan dan kodefikasinya. selanjutnya dalam hal Kegiatan pembukuan dilakukan secara benar dan teratur.

2. Pencatatan

Pelaksanaan proses pengelolaan barang milik daerah khususnya pencatatan aset tanah di Kota Mataram, setiap proses Pencatatan barang milik daerah harus dilakukan dengan mengisi Kartu Inventaris Barang (KIB) A berupa aset tanah. Tanah diisi untuk menjadi data administrasi pada aset tanah, sehingga tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram terdaftar secara keseluruhan baik yang merupakan Hak Milik, Hak Pakai, maupun Hak Guna bangunan diatas tanah.

Tabel 1.3

Kriteria Papan Tanda Kepemilikan Tanah

No	Kriteria	Kondisi Yang Ada	Keterangan
----	----------	------------------	------------

1	2	3	4
1.	Berbahan material yang tidak mudah rusak	√	Papan tanda kepemilikan terbuat dari bahan seng yang lebih kuat dan awet
2.	Diberikan tulisan tanda kepemilikan	√	“TANAH MILIK”
3.	Gambar lambing pemerintah daerah	√	Terdapat gambar lambang/ logo Kota Mataram
4.	Informasi lain yang dianggap perlu	√	Tertera beberapa informasi tambahan lainnya, meliputi: Nomor sertifikat, luas tanah, tanggal dan desa yang menjadi letak aset tanah tersebut

Sumber : data diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 1.3 pemasangan tanda kepemilikan tanah hanya boleh dilakukan pada tanah yang statusnya sudah sah dan jelas merupakan milik Pemerintah Kota Mataram. Meskipun papan tanda kepemilikan tanah sudah dibuat sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum terpasang secara keseluruhan.

Kepemilikan aset tanah yang masih banyak tidak didukung dengan bukti hak atas tanah yang sah (sertifikat) sehingga hak atas aset tersebut tidak jelas dan rawan terhadap penyalahgunaan. Selain itu adanya aset tanah yang belum bersertifikat dan memiliki atas hak tersebut menjadikan posisi pemda Kota Mataram menjadi lemah ketika terlibat dalam adanya sengketa tanah dengan pihak luar dikarenakan kurangnya bukti kepemilikan yang pemda miliki. Wawancara dengan Kepala Bidang Aset Daerah, Ibu Devi Hastuti Parlina, M.ak mengatakan bahwa :

Memang ada 3 ribu sekian tanah yang belum bersertifikat. Itu mulai sejak terbentuknya Kota Mataram terhadap temuan ini BKD sudah mulai melakukan beberapa upaya. Salah satunya dengan bekerjasama dengan BPN Kota Mataram untuk mempercepat penerbitan sertifikat termasuk juga berkaitan dengan bidang tanah yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar). Keseluruhan bidang tanah yang belum bersertifikat ini belum diketahui luas seluruhnya. Karena jumlahnya sangat banyak dan anggarannya terbatas. Sementara terkait aset yang masih dimiliki Pemkab Lobar seperti arena Shopping Center disebutkan sudah memiliki Hak Penggunaan Lahan

(HPL). Menurutnya seluruhnya sudah menjadi milik Kota Mataram. Ini yang akan disertifikatkan menjadi milik Kota Mataram seluruhnya. Tetap kita lakukan koordinasi dengan Lombok Barat Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menarik kesimpulan dari peran Pemerintah Kota Mataram dan Pemerintah kabupaten Lombok barat masih belum diselesaikan secara penuh khususnya terkait aset tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Mataram dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Hal tersebut harus lebih diperhatikan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Mataram. Dikarenakan rawannya akan pengklaiman yang dilakukan oleh masyarakat karena ketidaktahuan masyarakat akan aset tanah pemda.

3. Inventarisasi

Tabel 1.4

Indikator Inventarisasi dalam Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Atas LKPD

No	Pernyataan	Keterangan
1	2	3
1	Melakukan kegiatan pencatatan seluruh aset yang telah dimutasi atau dihapuskan	Sangat baik
2	Kegiatan Inventarisasi berupa persediaan dan kontruksi dalam pengerjaan dilaksanakan rutin setiap tahu	Sangat baik
3	Pelaporan kepada pengelola selambatnya 3 (tiga) bulan	Sangat baik
4	Kegiatan inventarisasi pada pengguna dilakukan periodic secara rutin paling lambat 5 (lima) tahun	Sangat baik
5	Kegiatan inventarisasi dilakukan secara benar dan teratur setiap bulan dan tahunnya	Sangat baik

Sumber : Hasil pengolahan data oleh penulis

Berdasarkan pada tabel 1.4 diatas, berdasarkan pada hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi didapatkan hasil yang mana pada inventarisasi ini BKD Kota Mataram telah melakukan kegiatan pencatatan seluruh aset yang telah dimutasi atau dihapuskan dengan sangat baik, dan Kegiatan inventarisasi berupa persediaan dan kontruksi dalam pengerjaan dilaksanakan rutin setiap tahun, Kegiatan inventarisasi pada pengguna dilakukan periodik secara rutin paling lambat 5 (lima) tahun, serta kegiatan inventarisasi pada BKD Kota Mataram Kabupaten ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara benar dan teratur setiap bulan dan tahunnya.

4. Pelaporan

Tabel 1.5

Indikator Pelaporan dalam Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Atas LKPD

No.	Pernyataan	Keterangan
1	2	3
1.	Kuasa atau pengguna barang menyusun Laporan Pengguna Barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan	Sangat Baik
2.	Melakukan pengimpunan seluruh laporan pengguna barang tahunan dan 5 (lima) tahunan	Sangat Baik
3.	Melaporkan mutasi atas aset tetap yang dilaporkan setiap semester	Sangat Baik
4.	Melaporkan inventarisasi barang mencantumkan jenis, merk, type, dan nilai barang	Sangat Baik
5.	Kegiatan pelaporan dikerjakan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Sangat Baik

Sumber : Hasil Pengolahan Data oleh Penulis

Berdasarkan tabel 1.5 di atas berdasar pada hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di BKD Kota Mataram diperoleh hasil yang mana pada kegiatan pelaporan pada penatausahaan aset tetap ini Kuasa atau pengguna barang rutin melakukan penyusunan Laporan Pengguna Barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan dan juga rutin dalam hal melakukan pengimpunan seluruh laporan pengguna barang tahunan dan 5 (lima) tahunan, dan dalam hal pelaporan mutasi atas aset tetap telah dilaporkan setiap semester secara rutin,serta seluruh kegiatan pelaporan ini sudah sesuai dengan payung hukum atau ketentuan yang berlaku dalam kegiatannya.

Wawancara dengan. Kepala Badan Keuangan H. MOH SYAKIRIN HUKMI, SE, MM mengatakan bahwa :

Pada dasarnya pelaporan ini sudah berjalan dengan lancar dan mendekati maksimal, dari segi indikator yang ditanyakan saudara, dan juga saudara telah melihat dokumennya ini bisa dikatakan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penatausahaan aset. Jadi pelaporan ini kan hal yang kadang suka diabaikan, tetapi disini kami terus berupaya agar memaksimalkan lagi tahap pelaporan sehingga nantinya pelaporan ini lancar dan tidak ada yang terlambat dalam penyampaiannya.

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut terlihat bahwa laporan keuangan pemerintah kota mataram telah terpenuhi dan berjalan maksimal. Laporan hasil dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menunjukkan indikasi laporan yang baik.

3.2. Hambatan yang ditemukan pada optimalisasi penatausahaan aset tetap tanah atas laporan keuangan

Sudah dijelaskan secara terperinci proses pengelolaan aset/ barang milik daerah dengan berbagai siklusnya, namun dalam setiap pelaksanaannya, masih terdapat kendala walaupun sudah dilakukan

sesuai dengan prosedur yang ada. Berikut peneliti sajikan dari temuan hasil pengamatan pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram terhadap beberapa masalah yang terjadi.

Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset di ruangannya beliau mengatakan bahwa:

Pengelolaan barang milik daerah di Badan Keuangan Daerah Kota Mataram meliputi keseluruhan kegiatan yang dimana sudah berjalan dengan baik walaupun pengamanan aset tetap tanah kurang memadai tapi sudah optimal dalam pengerjaan yang dimana sumber daya di bagian aset kurang tapi kami memiliki orang yang berkualitas.

Berdasarkan hasil wawancara sudah dilaksanakan dengan baik walaupun sumber daya yang kurang sehingga dalam pengerjaannya agak sedikit terlambat tapi sudah memadai dan membutuhkan tenaga yang ekstra sehingga bisa optimal dalam pengerjaannya.

Penatausahaan barang milik daerah pada dasarnya harus dilakukan dengan optimal baik dalam pembukuan, inventarisasi, maupun pelaporan harus dilakukan secara tertib dan berkualitas. Sehingga, penatausahaan barang milik daerah dapat memiliki ketertiban yang akan nantinya membuat perencanaan kebutuhan barang yang lebih baik. Penatausahaan barang yang tertib dapat menjadi bahan analisis dalam membuat perencanaan barang dan aset secara periodik dari tahun ke tahun.

Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset di ruangannya beliau mengatakan bahwa :

Kegiatan Penatausahaan Aset sudah Optimal dan berjalan sangat baik hambatannya hanya saja kurang SDM karena kegiatan yang sangat banyak sedangkan SDM belum optimal sehingga Badan Keuangan Daerah mengajukan ke Badan Kepegawaian Daerah untuk mengajukan SDM sehingga lebih maksimal dalam kegiatan Penatausahaan lebih optimal dan tidak terlalu banyak mengurus tenaga yang sangat banyak ditambah banyak ada kegiatan lapangan sehingga membutuhkan tenaga dan SDM yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara diatas sudah optimal dalam kegiatan penatausahaan walaupun SDM yang kurang memadai dan dalam kegiatan Penatausahaan di butuhkan tenaga dan SDM. Para pemuda juga harus mampu mendorong seluruh pihak termasuk orang tua di lorong untuk ikut aktif di taman baca bahkan saling berbagi tugas untuk bergantian membacakan buku-buku cerita kepada anak-anak. Apalagi program ini diintegrasikan dengan program Kotaku, program Bank Sampah, serta Program Karang Taruna, sehingga menjadi satu kesatuan agar lingkungan semakin baik dan menciptakan ketentraman dalam bingkai kebersamaan.

(a) Pengadministrasian aset tanah pada zaman dahulu yang kurang baik

Pengadministrasian aset tanah pada zaman dahulu kurang baik secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pengamanan aset tetap tanah sekarang ini karena hal tersebut menimbulkan suatu permasalahan. Pengadministrasian aset tanah pada zaman dahulu yang kurang baik membuat belum lengkapnya data atau dokumen tentang tanah tersebut.

(b) Lambatnya proses sertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional dikarenakan adanya pengukuran.

Adanya keterlambatan dalam penerbitan sertifikat tanah pemda dikarenakan adanya pengukuran. Dimana jumlah pengukur BPN yang sedikit sedangkan aset tanah yang diukur itu sangat banyak sehingga menjadi lambat prosesnya.

(c) Kurangnya Pengawasan yang Dilakukan Dalam Penatausahaan Aset Tanah.

Pada dasarnya Sumber Daya Manusia merupakan salah satu modal yang memegang peranan sangat penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan tentunya diperlukan SDM yang professional, bertanggungjawab, serta berkompetensi yang ada didalamnya dibekali tingkat penguasaan ilmu

pengetahuan dan terampilan yang dibutuhkan oleh pejabat yang sedang didudukinya. Termasuk di Badan Keuangan Daerah Kota Mataram. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, telah didukung oleh SDM sebanyak 109 orang Aparatur Sipil Negara 10 orang anggota staf yang diangkat sebagai tenaga honorer kontrak.

3.3.Upaya yang dapat diterapkan pada Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Tanah Atas Laporan Keuangan

A. Pengaman Administrasi

- 1) Adanya inovasi terhadap aplikasi berbasis web yang dikembangkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada.

Badan Keuangan Daerah Kota Mataram dalam hal meningkatkan pengamanan terhadap aset tanah pemda telah membuat suatu inovasi yang diwujudkan dalam bentuk program aplikasi yang dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi yang ada dalam pengamanan aset tetap tanah secara administratif. Adanya inovasi terhadap aplikasi berbasis web yang dikembangkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada.

Badan Keuangan Daerah Kota Mataram dalam hal meningkatkan pengamanan terhadap aset tanah pemda telah membuat suatu inovasi yang diwujudkan dalam bentuk program aplikasi yang dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi yang ada dalam pengamanan aset tetap tanah secara administrative.s, serta seluruh pihak yang mendukung untuk mempertahankan dan memberikan bacaan yang bermutu untuk anak-anak di kelurahan Paccinongang khususnya dan di Kabupaten Gowa pada umumnya.

- 2) Meningkatkan koordinasi kepada pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram

Adanya kendala terkait kurangnya koordinasi anataran Badan Keuangan Kota Mataram dengan Badan Pertanahan Nasional menimbulkan berbagi permasalahan. Sehingga pihak Badan Keuangan Derah Kota Mataram mulai melakukan hubungan koordinasi yang lebi baik lagi dan lebih instens hal yang dilakukan antara lain lebih sering melakukan peninjauan ke kantor BPN. Bisa Menempuh Jalur PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap) dalam Pengsertifikatan Tanah Pemda. Dalam permasalahan lambannya pengsertifikatan tanah yang dilakukakn oleh BPN, Badan Keuangan Daerah telah mengambil langkah untuk menempuh jalur PTSL yang merupakan program pemerintah. Selain itu prosesnya lebih cepat.

B. Melakukan Pengawasan Ketat

1. Mengadakan pelatihan dan gathering

Disamping itu, dalam upaya mengembangkan kemampuan yang dimiliki para pegawai harus diimbangi dengan jumlah pegawai yang memadai yang sesuai dengan kebutuhan guna mewujudkan tujuan suatu organisasi secara lebih efektif dan efisien serta dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi badan atau instansi terkait. Karena hal ini tentunya juga akan sangat mendukung pekerjaan yang sedang maupun yang akan dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.

2. Melakukan pemaksimalan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan aset pertanggal 10 pada tiap bulan berjalan bersama seluruh OPD

Rekonsiliasi dan konsolidasi laporan aset pertanggal 10 pada tiap bulan berjalan yang di lakukan bersama seluruh OPD telah dilakukan secara maksimal dengan mengharuskan dinas harus menyelesaikan secara tepat waktu. Maka dari itu upaya ini merupakan salah satu cara yang tepat dalam mengatasi salah satu hambatan yang terjadi dalam pengoptimalan penatausahaan aset tetap atas laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian di Kota Mataram.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penulis menemukan berbagai temuan yang menjadi permasalahan atas tidak optimalnya aset tetap tanah di Kota Mataram, seperti halnya penelitian terdahulu yang penulis cantumkan, terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu, karena tahun 2022 ini, merupakan tahun terbaru yang diambil peneliti untuk meneliti pengoptimalisasian aset tetap tanah. Perbedaannya terletak pada temuan utama peneliti yaitu banyak dari tanah yang tidak bersertifikat di Kota Mataram hal ini tidak terkoordinasikan dan tidak terlaksana dengan baik karena mengingat jumlah personil pantausahaan aset yang sedikit dengan beban kerja yang segitu banyak, kami berharap dapat memperoleh tambahan personil staf penatausahaan aset tetap. Apabila dalam pemasangan plang yang membutuhkan banyak personil agar pemasangannya bisa cepat selesai. Hal ini merupakan temuan baru yang menjadi permasalahan dan membutuhkan perhatian pemerintah.

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat yaitu terkait teknologi dan informasi dimana masyarakat akan lebih paham dan mudah dengan adanya pemetaan digital yang baru karena zaman sudah berkembang jadi perlu adanya data yang baru sehingga mepermuda masyarakat dalam menentukan titik koordinat dan tidak ribet hanya saja yang di perlukan kesadaran masyarakat terhadap Undang-undang dan pemahaman peraturan yang berlaku

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang optimalisasi penatausahaan aset tetap atas laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Mekanisme penatausahaan aset tanah yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Mataram secara keseluruhan sesuai apa yang diatur. penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hambatan-hambatan atau kendala dalam penatausahaan aset tetap ada. Masih Kurang SDM yang ada sehingga masih belum Optimal karena bagian Penatausahaan sangat banyak
2. Hambatan yang ditemukan pada optimalisasi penatausahaan aset tetap tanah atas laporan keuangan. Pengamanan administrasi aset tanah pada zaman dahulu yang kurang baik dan dimana ada beberapa aset tanah kota mataram hibah dari kabupaten Lombok barat yang dimana dihibahkan tidak dapat sertifikat tanah. Serta lambatnya proses sertifikat oleh Badan Pertahanan Nasional. Serta kurangnya pengawasan yang dilakukan dalam penatausahaan aset tanah. Sumber daya aparatur yang kurang memadai pada dasarnya SDM salah satu modal yang memegang peranan sangat penting. Terdapat proses hambatan pelaksanaan rekonsiliasi laporan aset atas mutasi perbulan yang terhambat.
3. Upaya yang dapat diterapkan pada Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Tanah Atas Laporan Keuangan. Adanya inovasi terhadap aplikasi berbasis Web yang dikembangkan dengan manfaat

kemajuan teknologi yang ada. Adapun program inovasi yang telah dibuat oleh Badan Keuangan Daerah yang dimana ada program pemetaan digital yang dikembangkan untuk mempermudah dalam mengetahui letak aset tanah secara lebih akurat. Setelah itu penyimpanan yang dilakukan dalam bentuk format untuk mempermudah mengakses data tanah serta lebih aman. Upaya Badan Keuangan Daerah pada Optimalisasi meningkatkan koordinasi kepada pihak Badan Pertahanan Nasional Kota Mataram dengan melakukan pengawasan yang ketat dengan mengadakan pelatihan dan gathering serta melakukan pemaksimalan rekonsiliasi dan konsolidasi pertanggal 10 pada tiap bulan berjalan bersama seluruh OPD.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu peneliti hanya mampu untuk mengambil satu jenis aset tetap saja yaitu aset tetap tanah, sehingga tidak dapat membandingkan dengan aset tetap lainnya yang ada di Kota Mataram.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian selanjutnya di masa mendatang pada lokasi serupa khususnya Kota Mataram mengenai optimalisasi aset tetap tanah maupun aset tetap lainnya.

IV. UCAPAN TERIMA KASIH

Bapak Dr. Hadi Prabowo, MM selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bapak Dr. Halilul Khairi, M.Si selaku Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan, Bapak Dr. Marja Sinurat, M.Pd., MM selaku Ketua Prodi Keuangan Publik dan Ibu Eljawati, S.Sos, MM selaku Dosen Pembimbing.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Mamesah. (1995). Sistem Administrasi Keuangan Daerah. Gramedia.
- Mintzberg, Henry, Bruce, Ahsstrand, & Lampel, J. (1998). Strategy Safari : A Guided Tour Through The Wilds of Strategic Management. The Free Press.
- Bruce, L. . (2001). Qualitative Research Methods for the Social Sciences. Allyn and. Mardiasmo. (2002). Prinsip Dasar Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah. FE- UGM.
- Kothari, C. . (2004). Research Methodology : Methods and techniques. New Age International (P) Ltd., Publishers. Jogiyanto, H. (2005). Sistem Informasi Strategi untuk Keunggulan Kompetitif. Andi Publisher.
- Mardiasmo. (2005). Akutansi Sektor Publik. Andi Yogyakarta.
- Wulan, Fitri (2019). Pengelolaan Aset Daerah Aset Tanah Miliki Pemerintah Daerah Kabupaten Meranti. Vol.5. 22-27.
- Shandra (2015). Aset Tetap Tanah Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Publik Pada Badan Pengelolaan Keuangan. Vol 10. 144-150.
- Atalia, Ayu (2019). Pengaruh Pengelolaan Aset Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Vol 9. 232-250.
- Darmanto, Aresta. 2016. "Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kutai Timur" .eJournal Ilmu Administrasi Bisnis 4, no. 1.
- Huda, Mohammad Nurul. 2018. "Optimalisasi Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa". Ta'dibi VI, no. 52-54.

